

Analisis Prioritas dan Keselarasan Kebijakan Pengembangan Kampung Wisata di Kota Banjarmasin

Admi Lidya Sari¹, Shafrina Amalia²

Program Studi Administrasi Publik, Jurusan Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lambung Mangkurat^{1,2}

*Email Korespondensi: admilidya@ulm.ac.id

Diterima: 20-07-2026 | Disetujui: 26-07-2026 | Diterbitkan: 28-07-2026

ABSTRACT

The development of tourism villages has become an important component of Banjarmasin City's tourism policy, which is oriented toward river-based tourism and the preservation of Banjar culture. The diversity of characteristics and needs among tourism villages requires the local government to determine policy priorities that are appropriate to the conditions of each destination. This study aims to analyze the policy priorities of the Banjarmasin City Government in developing tourism villages and to examine the alignment of these priorities with the development needs of tourism villages. The study employs a descriptive qualitative approach using document analysis. Data were obtained from the Regional Medium-Term Development Plan (RPJMD), Strategic Plan (Renstra), Regional Government Work Plan (RKPD), Work Plan (Renja), performance reports, regulations related to tourism villages, statistical and sectoral data, official government publications, and previous studies published during the 2021–2025 period. The data were analyzed using qualitative content analysis, thematic coding, longitudinal analysis, and policy alignment analysis. The results show that tourism village development policies are cross-programmatic, with destination and infrastructure development emerging as the most dominant operational priorities, followed by marketing, human resource development, community empowerment, and the creative economy. Meanwhile, river-based tourism and Banjar culture remain consistent strategic orientations. Substantively, there is alignment between government policy priorities and the needs of tourism villages; however, these needs vary across destinations. Policy gaps primarily concern the differentiation of interventions, consistency of implementation, and the ability of policies to respond to the specific needs of each tourism village. This study recommends a place-based policy approach through mapping the needs and development stages of each tourism village as a basis for determining intervention priorities and resource allocation.

Keywords: *tourism villages; policy priorities; policy alignment; place-based policy; tourism; Banjarmasin.*

ABSTRAK

Pengembangan kampung wisata menjadi bagian penting dalam kebijakan pariwisata Kota Banjarmasin yang berorientasi pada pariwisata berbasis sungai dan pelestarian budaya Banjar. Keragaman karakteristik dan kebutuhan setiap kampung wisata menuntut pemerintah daerah menentukan prioritas kebijakan yang sesuai dengan kondisi destinasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prioritas kebijakan Pemerintah Kota Banjarmasin dalam pengembangan kampung wisata serta mengkaji keselarasan prioritas tersebut dengan kebutuhan pengembangan kampung wisata. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis dokumen. Data bersumber dari RPJMD, Renstra, RKPD, Renja, laporan kinerja, regulasi terkait kampung wisata, data statistik dan sektoral, publikasi resmi pemerintah, serta penelitian terdahulu selama periode 2021–2025. Data dianalisis melalui analisis isi kualitatif, *coding* tematik, analisis longitudinal, dan *policy alignment analysis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengembangan kampung wisata bersifat lintas-program (*cross-programmatic*), dengan pengembangan destinasi dan infrastruktur sebagai prioritas operasional paling dominan, diikuti pemasaran, pengembangan sumber daya manusia, pemberdayaan masyarakat, dan ekonomi kreatif, sementara wisata berbasis sungai dan budaya Banjar menjadi orientasi strategis yang konsisten. Secara substantif terdapat keselarasan antara prioritas kebijakan pemerintah dan kebutuhan kampung wisata, tetapi kebutuhan tersebut berbeda antar-destinasi. Kesenjangan kebijakan terutama terletak pada diferensiasi intervensi, konsistensi implementasi, dan kemampuan kebijakan merespons kebutuhan spesifik setiap kampung. Penelitian ini merekomendasikan pendekatan kebijakan berbasis karakter tempat (*place-based policy*) melalui pemetaan kebutuhan dan tahap perkembangan masing-masing kampung sebagai dasar penentuan prioritas intervensi dan alokasi sumber daya.

Kata kunci: kampung wisata; prioritas kebijakan; *policy alignment*; *place-based policy*; pariwisata; Banjarmasin.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Sari, A. L., & Amalia, S. . (2026). Analisis Prioritas dan Keselarasan Kebijakan Pengembangan Kampung Wisata di Kota Banjarmasin. Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 2(3), 3003-3016. <https://doi.org/10.63822/pyqhby39>

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan daerah karena tidak hanya berkontribusi terhadap aktivitas ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan masyarakat, pelestarian budaya, dan penguatan identitas lokal. Dalam perspektif administrasi publik, pembangunan pariwisata tidak semata-mata dipahami sebagai upaya meningkatkan daya tarik dan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi merupakan bagian dari proses kebijakan publik yang melibatkan penetapan agenda, penentuan prioritas, alokasi sumber daya, koordinasi antaraktor, serta pencapaian tujuan pembangunan daerah. Oleh karena itu, kemampuan pemerintah daerah dalam menentukan prioritas kebijakan menjadi penting untuk memastikan pengembangan pariwisata berlangsung secara terarah, efektif, dan berkelanjutan.

Kebutuhan terhadap penetapan prioritas semakin relevan ketika pemerintah daerah dihadapkan pada beragam potensi destinasi dan keterbatasan sumber daya pembangunan. Pengembangan destinasi membutuhkan dukungan infrastruktur, sumber daya manusia, kelembagaan, promosi, pemberdayaan masyarakat, dan pembiayaan yang tidak selalu dapat diberikan secara merata. Dalam kondisi tersebut, pemerintah perlu menentukan aspek dan bentuk intervensi yang memperoleh perhatian dalam proses perencanaan pembangunan. Prioritas kebijakan dengan demikian tidak hanya menunjukkan pilihan program pemerintah, tetapi juga merefleksikan bagaimana pemerintah mendefinisikan persoalan, mengalokasikan sumber daya, dan mengarahkan pembangunan pariwisata daerah.

Konteks tersebut relevan dengan Kota Banjarmasin yang memiliki karakter kuat sebagai kota sungai. RPJMD Kota Banjarmasin 2021–2026 menunjukkan bahwa pemerintah telah memetakan pariwisata kota ke dalam tujuh kelompok, yaitu wisata kuliner, kampung tematik, religi dan sejarah, belanja, alam, buatan, dan wisata umum. Dalam kategori wisata kampung tematik tercantum antara lain Kampung Hijau Sungai Bilu, Kampung Biru, Kampung Ketupat, Kampung Arab, Kampung Sasirangan, Kampung Sungai Jingah, Kampung Basirih, Kampung Sungai Andai, Kuin Kacil, Kampung Tanggui, dan Kampung Sungai Dayung. Dokumen tersebut juga menempatkan pembangunan pariwisata dalam kerangka kepariwisataan inklusif dengan orientasi pada peningkatan usaha dan tenaga kerja lokal serta kolaborasi antarpemangku kepentingan.

Pengembangan wisata berbasis kampung juga memperoleh landasan regulatif melalui kebijakan mengenai Kampung Banjar. Regulasi tersebut mengatur penetapan Kampung Banjar sebagai kampung wisata serta memberikan perhatian pada perlindungan dan pemanfaatan nilai budaya lokal. Pada tingkat perencanaan sektoral, Renstra Disbudporapar Kota Banjarmasin 2021–2026 bahkan memuat pengembangan kampung-kampung tematik sebagai destinasi wisata/wisata edukasi, termasuk pengembangan kampung tematik baru dan optimalisasi Kampung Sasirangan melalui pemetaan potensi wisata. Hal tersebut menunjukkan bahwa kampung wisata telah menjadi bagian dari agenda formal pembangunan pariwisata Kota Banjarmasin.

Potensi pengembangan tersebut didukung oleh keberadaan berbagai kampung wisata dengan karakteristik yang berbeda. Data resmi Pemerintah Kota Banjarmasin mencatat sembilan desa wisata, antara lain Desa Wisata Kampung Sasirangan Sungai Jingah, Kampung Hijau Sungai Bilu, Kampung Ketupat, Kuin Utara, Kampung Arab, Kubah Surgi Mufti, Kubah Basirih, Mantuil, dan Sungai Biuku. Keragaman tersebut menunjukkan bahwa pengembangan wisata berbasis kampung memiliki basis yang cukup luas, sekaligus menimbulkan kebutuhan terhadap kebijakan yang mampu merespons karakteristik masing-masing destinasi.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kebutuhan pengembangan kampung dan kawasan wisata di Banjarmasin bersifat heterogen. Kampung Sasirangan memiliki potensi pada produk sasirangan, arsitektur tradisional Banjar, dan karakter permukiman tepian sungai, tetapi masih menghadapi persoalan kualitas lingkungan (Mapaliey & Idajati, 2022). Kampung Hijau memiliki potensi pengembangan wisata edukasi berbasis lingkungan dan *Community-Based Tourism* (Riadi et al., 2020), sedangkan Kampung Sungai Jingah memiliki potensi wisata yang memadai tetapi membutuhkan peningkatan pengetahuan dan kemampuan komunikasi masyarakat (Risanta & Diany, 2025). Potensi ekonomi dan budaya lokal juga terlihat pada Kampung Ketupat melalui industri rumah tangga ketupat, lontong, dan kerajinan nipah (Ling & Muchamad, 2022), sementara kawasan wisata kuliner Banua Anyar membutuhkan dukungan pengelolaan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana (Jannah et al., 2022). Temuan tersebut menunjukkan bahwa setiap destinasi memiliki kombinasi potensi dan permasalahan yang berbeda sehingga tidak selalu membutuhkan bentuk intervensi kebijakan yang sama.

Persoalan prioritas pengembangan kampung wisata telah dibahas oleh Maulana dan Maulina (2024) melalui perbandingan Kampung Sasirangan, Kampung Hijau, dan Kampung Biru menggunakan *Analytical Hierarchy Process* (AHP). Penelitian tersebut menempatkan daya tarik sebagai kriteria dengan bobot prioritas tertinggi, diikuti sarana dan prasarana, aksesibilitas, serta promosi wisata. Berdasarkan alternatif destinasi, Kampung Sasirangan memperoleh nilai prioritas lebih tinggi dibandingkan Kampung Hijau dan Kampung Biru. Studi tersebut memberikan gambaran mengenai destinasi dan aspek yang dinilai perlu memperoleh prioritas dalam pengembangan kampung wisata.

Meskipun demikian, terdapat perbedaan antara prioritas kebutuhan pengembangan destinasi dan prioritas kebijakan pemerintah daerah. Penelitian terdahulu umumnya berangkat dari tingkat destinasi untuk mengidentifikasi potensi, kendala, strategi pengembangan, atau menentukan destinasi yang seharusnya diprioritaskan. Dari perspektif administrasi publik, prioritas juga perlu dilihat sebagai pilihan pemerintah yang tercermin dalam tujuan, sasaran, program, kegiatan, indikator, target, dukungan sumber daya, dan realisasi kebijakan. Dengan demikian, aspek atau destinasi yang dinilai *seharusnya* diprioritaskan belum tentu identik dengan apa yang *secara aktual* memperoleh perhatian dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.

Berdasarkan telaah tersebut, terdapat *research gap* dalam kajian pengembangan kampung wisata di Kota Banjarmasin. Penelitian terdahulu telah memberikan pengetahuan yang relatif luas mengenai potensi, kendala, strategi, atraksi, serta prioritas pengembangan pada tingkat destinasi. Namun, kajian yang menempatkan prioritas sebagai pilihan kebijakan pemerintah daerah dan menelusuri konsistensinya dari dokumen strategis, perencanaan tahunan, hingga dokumen kinerja masih terbatas. Selain itu, masih diperlukan analisis mengenai sejauh mana prioritas kebijakan tersebut selaras dengan kebutuhan empiris kampung wisata yang memiliki karakteristik dan persoalan yang berbeda.

Penelitian ini menawarkan kebaruan melalui dua aspek. Pertama, penelitian menggeser fokus dari pemeringkatan destinasi menuju analisis prioritas kebijakan pemerintah daerah, dengan menelusuri arah kebijakan, program, kegiatan, indikator, target, dukungan sumber daya, dan realisasi selama periode 2021–2025. Kedua, prioritas tersebut dianalisis lebih lanjut melalui perspektif keselarasan kebijakan (*policy alignment*) dengan membandingkannya terhadap kebutuhan pengembangan kampung wisata yang telah diidentifikasi dalam penelitian terdahulu. Pendekatan tersebut memungkinkan penelitian tidak hanya mengidentifikasi apa yang diprioritaskan pemerintah, tetapi juga menilai sejauh mana orientasi kebijakan mampu merespons keragaman kebutuhan destinasi.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prioritas kebijakan Pemerintah Kota Banjarmasin dalam pengembangan kampung wisata serta mengkaji keselarasan prioritas tersebut dengan kebutuhan pengembangan kampung wisata. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi terhadap kajian administrasi publik, khususnya mengenai prioritas kebijakan, konsistensi perencanaan, dan tata kelola pembangunan pariwisata daerah, sekaligus memberikan masukan bagi pengembangan kebijakan kampung wisata yang lebih responsif terhadap karakteristik dan kebutuhan masing-masing destinasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis dokumen (*document analysis*). O'Leary & Hunt mengatakan bahwa analisis dokumen adalah cara untuk mengumpulkan dan mengkaji berbagai bentuk 'teks' tertulis yang ada atau yang tertuang dalam berbagai bentuk dokumen (Nurislamingsih & Heriyanto, 2024). Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis prioritas kebijakan Pemerintah Kota Banjarmasin dalam pengembangan kampung wisata serta mengkaji keselarasan antara prioritas kebijakan tersebut dengan kebutuhan pengembangan kampung wisata. Analisis dokumen dipilih karena fokus penelitian diarahkan pada kebijakan pemerintah yang tercermin dalam regulasi, dokumen perencanaan pembangunan, dokumen perencanaan perangkat daerah, serta laporan kinerja selama periode penelitian.

Data penelitian merupakan data sekunder yang bersumber dari dokumen resmi Pemerintah Kota Banjarmasin dan publikasi akademik yang relevan. Dokumen utama meliputi RPJMD Kota Banjarmasin 2021–2026, Rencana Strategis Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar) Kota Banjarmasin 2021–2026, RKPD Kota Banjarmasin, Rencana Kerja Disbudporapar, Laporan Kinerja (LKj) Disbudporapar tahun 2022–2025, serta regulasi yang berkaitan dengan pengembangan Kampung Banjar dan kampung wisata. Pemilihan dokumen tersebut didasarkan pada kedudukannya dalam proses perencanaan pembangunan. RPJMD dan Renstra digunakan untuk mengidentifikasi arah dan prioritas strategis, RKPD dan Renja untuk menelusuri penerjemahan prioritas ke dalam program, kegiatan, indikator, target, dan dukungan sumber daya tahunan, sedangkan LKj digunakan untuk mengidentifikasi realisasi dan capaian kebijakan.

Pemilihan dokumen tersebut juga didasarkan pada substansi kebijakan yang relevan dengan objek penelitian. Dokumen perencanaan Kota Banjarmasin telah menempatkan wisata kampung tematik sebagai salah satu kategori pengembangan pariwisata, sementara Renstra Disbudporapar memuat pengembangan kampung-kampung tematik sebagai destinasi wisata dan wisata edukasi. Dokumen regulatif mengenai Kampung Banjar juga memuat aspek pembinaan kelembagaan masyarakat, peningkatan keterampilan, pengembangan jaringan, pendampingan organisasi, serta fasilitasi sarana dan prasarana.

Data utama tersebut dilengkapi dengan publikasi Kota Banjarmasin Dalam Angka, data sektoral mengenai objek wisata, desa wisata, kelompok sadar wisata (Pokdarwis), dan kunjungan wisatawan, serta publikasi pada portal resmi Pemerintah Kota Banjarmasin. Data statistik dan sektoral digunakan terutama untuk memberikan konteks terhadap kondisi pariwisata daerah. Selain itu, penelitian terdahulu mengenai Kampung Sasirangan, Kampung Hijau, Kampung Sungai Jingah, Kampung Ketupat, Banua Anyar, dan Kampung Biru digunakan untuk mengidentifikasi potensi, kendala, serta kebutuhan pengembangan pada tingkat destinasi.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan tahapan identifikasi, seleksi, klasifikasi, dan penelaahan dokumen. Dokumen dipilih berdasarkan tiga kriteria, yaitu: (1) berasal dari sumber resmi pemerintah atau publikasi akademik yang dapat diverifikasi; (2) memuat informasi mengenai arah kebijakan, program, kegiatan, indikator, target, dukungan sumber daya, capaian, potensi, atau permasalahan pengembangan pariwisata dan kampung wisata; serta (3) relevan dengan lokasi dan periode penelitian. Periode utama analisis ditetapkan pada 2021–2025 untuk menangkap konsistensi maupun perubahan prioritas kebijakan selama periode RPJMD Kota Banjarmasin 2021–2026. Dokumen di luar periode tersebut digunakan secara terbatas sebagai data kontekstual.

Data dianalisis menggunakan analisis isi kualitatif (*qualitative content analysis*) melalui proses *coding*, kategorisasi, dan pengembangan tema (Nurislaminingsih & Heriyanto, 2024). Tahap pertama dilakukan dengan mengidentifikasi unit-unit informasi dalam dokumen berupa tujuan, sasaran, arah kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan, indikator, target, dukungan sumber daya, serta capaian yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata dan kampung wisata. Tahap kedua dilakukan melalui pemberian kode dan pengelompokan informasi ke dalam kategori tematik. Berdasarkan pembacaan awal dokumen, kategori analisis mencakup pengembangan destinasi dan atraksi, infrastruktur dan amenitas, sumber daya manusia dan pemberdayaan; kelembagaan dan kolaborasi; promosi dan pemasaran; ekonomi lokal dan ekonomi kreatif; budaya dan identitas lokal; lingkungan dan keberlanjutan; serta wisata berbasis sungai. Kategori tersebut digunakan sebagai kategori awal dan dikembangkan kembali apabila ditemukan tema lain selama proses analisis.

Tahap ketiga dilakukan melalui analisis longitudinal untuk menelusuri konsistensi dan perubahan prioritas antar-dokumen dan antar-tahun. Suatu dimensi diinterpretasikan memiliki prioritas yang kuat apabila didukung oleh kombinasi bukti berupa (1) posisi strategis dalam tujuan, sasaran, atau arah kebijakan; (2) penerjemahan ke dalam program, kegiatan, atau subkegiatan; (3) kontinuitas kemunculan lintas dokumen dan tahun; (4) keberadaan indikator dan target kinerja; serta (5) dukungan sumber daya yang dapat ditelusuri dalam dokumen. Data anggaran yang tersedia digunakan sebagai bukti pendukung dan tidak dijadikan satu-satunya dasar dalam menentukan prioritas kebijakan.

Dalam penelitian ini, kategori “sangat konsisten” digunakan apabila suatu dimensi ditemukan secara berulang dalam dokumen strategis dan dokumen perencanaan tahunan pada sebagian besar periode 2021–2025, sedangkan kategori “konsisten” digunakan apabila dimensi tersebut muncul secara berulang tetapi tidak memiliki tingkat operasionalisasi yang sama pada setiap tahun. Suatu dimensi diinterpretasikan sebagai prioritas utama apabila menunjukkan posisi strategis yang kuat, kontinuitas lintas tahun, penerjemahan ke dalam program atau kegiatan, keberadaan indikator dan target kinerja, serta dukungan sumber daya secara simultan. Sementara itu, kategori prioritas pendukung digunakan untuk dimensi yang memiliki posisi strategis dan operasional tetapi dukungan atau kontinuitasnya relatif lebih terbatas dibandingkan prioritas utama. Sementara itu, kategori orientasi utama kebijakan digunakan untuk dimensi yang secara konsisten menempati posisi strategis sebagai arah atau tujuan pembangunan pariwisata, tetapi tidak secara langsung berfungsi sebagai instrumen operasional.

Tahap keempat dilakukan melalui analisis keselarasan kebijakan (*policy alignment analysis*). Prioritas kebijakan yang diperoleh dari analisis dokumen pemerintah dibandingkan dengan potensi, permasalahan, dan kebutuhan pengembangan kampung wisata yang diidentifikasi melalui penelitian terdahulu dan sumber resmi pemerintah. Analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi aspek yang telah memperoleh respons kebijakan (*policy alignment*) serta aspek yang belum sepenuhnya terakomodasi atau

menunjukkan kesenjangan (*policy gap*).

Keselarasannya dikategorikan kuat apabila kebutuhan empiris destinasi memiliki padanan langsung dan konsisten dalam arah kebijakan serta program atau kegiatan pemerintah. Kategori selaras secara substantif digunakan apabila kebutuhan destinasi memiliki padanan pada instrumen kebijakan yang relevan, tetapi belum secara spesifik diarahkan pada destinasi yang bersangkutan. Sementara itu, keselarasannya dinilai terbatas apabila bukti mengenai respons kebijakan terhadap kebutuhan destinasi belum memadai. Penilaian tersebut dilakukan secara kualitatif berdasarkan kecocokan antara kebutuhan empiris setiap destinasi dan substansi instrumen kebijakan yang teridentifikasi dalam dokumen pemerintah.

Kerangka analisis yang digunakan dapat diringkas sebagai berikut:

Tabel 1. Dimensi Analisis dan Fokus Identifikasi

Dimensi analisis	Fokus identifikasi
Posisi strategis	Tujuan, sasaran, arah dan prioritas kebijakan
Operasionalisasi	Program, kegiatan, dan subkegiatan
Konsistensi	Keberlanjutan tema antar-dokumen dan antar-tahun
Target kinerja	Indikator dan target program/kegiatan
Dukungan sumber daya	Anggaran dan sumber daya yang tercantum dalam dokumen
Realisasi	Capaian program dan kegiatan
Kebutuhan empiris	Potensi, kendala, dan kebutuhan kampung wisata
<i>Policy alignment</i>	Keselarasannya prioritas pemerintah dengan kebutuhan kampung
<i>Policy gap</i>	Aspek kebutuhan yang belum atau kurang terakomodasi

Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi dokumen. Triangulasi bertujuan untuk meningkatkan validitas data. Dengan membandingkan beberapa sumber atau metode, peneliti dapat memastikan bahwa temuan yang diperoleh benar-benar mencerminkan realitas (Evi et al., 2025). Informasi dalam dokumen strategis dibandingkan dengan dokumen perencanaan tahunan dan laporan kinerja, kemudian dikontekstualisasikan menggunakan data statistik, data sektoral, publikasi resmi pemerintah, dan hasil penelitian terdahulu. Prosedur ini sekaligus digunakan untuk membedakan antara arah kebijakan (*policy intention*), penerjemahan kebijakan ke dalam program, target dan sumber daya (*policy allocation*), serta capaian yang dilaporkan pemerintah (*policy realization*). Perbedaan tersebut dilakukan agar keberadaan suatu agenda dalam dokumen perencanaan tidak secara langsung diinterpretasikan sebagai bukti bahwa kebijakan telah terealisasi sepenuhnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prioritas Kebijakan Pengembangan Kampung Wisata di Kota Banjarmasin

Hasil analisis dokumen menunjukkan bahwa pengembangan kampung wisata di Kota Banjarmasin merupakan bagian dari arah pembangunan pariwisata yang lebih luas, terutama pariwisata berbasis sungai dan pelestarian budaya Banjar. RPJMD Kota Banjarmasin 2021–2026 secara eksplisit menetapkan Misi 5, yaitu mengembangkan pariwisata berbasis sungai dan memperkuat nilai budaya Banjar, dengan sasaran meningkatnya daya saing pariwisata daerah berbasis sungai dan pelestarian budaya Banjar. Arah kebijakan tersebut diterjemahkan melalui pengembangan daya tarik wisata berbasis sungai, kawasan strategis

pariwisata, destinasi inklusif dan berkelanjutan, kerja sama dan kemitraan, pemasaran, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif. Sebagian besar arah kebijakan tersebut direncanakan secara konsisten sepanjang periode 2021–2026.

Dalam struktur tersebut, kampung wisata memperoleh posisi yang cukup jelas. RKPD 2023 mengidentifikasi kategori “Wisata Kampung Tematik” yang mencakup Kampung Hijau Sungai Bilu, Kampung Biru, Kampung Ketupat, Kampung Arab, Kampung Sasirangan, Kampung Sungai Jingah, Kampung Basirih, Kampung Sungai Andai, Kuin Kacil, Kampung Tanggui, dan Kampung Sungai Dayung. Daftar yang relatif sama masih ditemukan dalam RKPD 2025, menunjukkan adanya kontinuitas pengakuan terhadap kampung tematik sebagai bagian dari kawasan pariwisata kota. Pada tingkat sektoral, Renstra Disbudporapar juga secara eksplisit memuat program pengembangan kampung-kampung tematik sebagai destinasi wisata/wisata edukasi, termasuk optimalisasi Kampung Sasirangan melalui pemetaan potensi wisata.

Berdasarkan proses *coding*, ditemukan sembilan dimensi kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan kampung wisata, yaitu pengembangan destinasi dan atraksi, infrastruktur dan amenitas, sumber daya manusia dan pemberdayaan, kelembagaan dan kolaborasi, promosi dan pemasaran, ekonomi lokal dan ekonomi kreatif, budaya dan identitas lokal, lingkungan dan keberlanjutan, serta wisata berbasis sungai. Hasil analisis longitudinal menunjukkan bahwa dimensi tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi terdistribusi dalam berbagai program dan kegiatan pemerintah.

Tabel 2. Dimensi, Posisi, Konsistensi dan Interpretasi Kebijakan

Dimensi kebijakan	Posisi dalam kebijakan	Konsistensi 2021–2025	Interpretasi
Destinasi dan atraksi	Strategis dan operasional	Sangat konsisten	Prioritas utama
Infrastruktur dan amenitas	Strategis dan operasional	Sangat konsisten	Prioritas utama
Promosi dan pemasaran	Strategis dan operasional	Sangat konsisten	Prioritas utama
SDM dan pemberdayaan	Strategis dan operasional	Konsisten	Prioritas pendukung
Kelembagaan dan kolaborasi	Strategis dan operasional	Konsisten	Prioritas pendukung
Ekonomi lokal/ekraf	Strategis dan operasional	Konsisten	Prioritas pendukung
Budaya dan identitas lokal	Strategis	Sangat konsisten	Orientasi utama kebijakan
Lingkungan/keberlanjutan	Strategis dan operasional	Konsisten	Prioritas pendukung
Wisata berbasis sungai	Strategis	Sangat konsisten	Orientasi utama kebijakan

Temuan tersebut menunjukkan dua lapisan prioritas. Pada level strategis, kebijakan diarahkan pada

penguatan identitas pariwisata berbasis sungai dan budaya Banjar. Pada level operasional, perhatian pemerintah lebih terkonsentrasi pada pengembangan destinasi dan infrastruktur, diikuti pemasaran, pengembangan SDM, pemberdayaan masyarakat, serta ekonomi kreatif. Dengan demikian, wisata sungai dan budaya Banjar lebih tepat dipahami sebagai *policy orientation*, sedangkan pengembangan destinasi, infrastruktur, pemasaran, SDM, dan ekonomi kreatif merupakan instrumen operasional untuk mencapai orientasi tersebut.

Dominasi Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur

Pengembangan destinasi dan infrastruktur merupakan prioritas yang memperoleh dukungan operasional paling kuat. Pada RKPD 2022, pengembangan dan promosi pariwisata telah ditempatkan dalam Prioritas Daerah “Memperkuat Perekonomian Melalui Sektor UMKM dan Pariwisata”. Program peningkatan daya tarik pariwisata memperoleh pagu Rp3,316 miliar, sementara program pemasaran pariwisata memperoleh Rp522,57 juta.

Pola tersebut semakin terlihat pada tahun-tahun berikutnya. Pada 2024, Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata memperoleh anggaran Rp7,819 miliar dengan realisasi Rp7,372 miliar atau 94,28%. Nilai tersebut lebih besar dibandingkan Program Pemasaran Pariwisata sebesar Rp3,925 miliar, Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebesar Rp2,715 miliar, serta Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual sebesar Rp381,31 juta.

Komposisi internal Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi semakin memperjelas orientasi tersebut. Dari Rp7,819 miliar pada 2024, sekitar Rp6,357 miliar dialokasikan pada pengadaan, pemeliharaan, dan rehabilitasi sarana-prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata. Realisasinya mencapai Rp6,026 miliar atau 94,80%. Dengan demikian, tingginya posisi destinasi dan infrastruktur bukan hanya terlihat dari frekuensi kemunculan dalam dokumen, tetapi juga didukung oleh operasionalisasi program dan alokasi sumber daya.

Pola tersebut berlanjut pada 2025. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata direncanakan sebesar Rp6,679 miliar, lebih tinggi dibandingkan pemasaran pariwisata sebesar Rp4,158 miliar dan pengembangan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif sebesar Rp3,543 miliar. Temuan ini memperkuat interpretasi bahwa pengembangan fisik dan kualitas destinasi merupakan prioritas operasional utama selama periode penelitian.

Meskipun demikian, dominasi pembangunan destinasi tidak berarti kebijakan sepenuhnya berorientasi pada aspek fisik. Pemerintah juga mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dan peningkatan kapasitas pengelola. Renja 2024, misalnya, memuat penerapan destinasi pariwisata berkelanjutan serta peningkatan kapasitas SDM pengelola kawasan strategis dengan target 50 orang. Dengan demikian, pendekatan pembangunan destinasi mulai bergerak dari penyediaan fasilitas menuju pengelolaan destinasi yang lebih komprehensif.

Pemberdayaan Masyarakat, SDM, dan Ekonomi Kreatif

Pemberdayaan masyarakat telah menjadi bagian dari kebijakan sejak awal periode penelitian. RKPD 2022 secara eksplisit memasukkan Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (*Community-Based Tourism/CBT*), termasuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat. Orientasi ini sejalan dengan karakter kampung wisata yang menjadikan masyarakat bukan hanya sebagai penerima

manfaat, tetapi juga sebagai pelaku pengelolaan destinasi.

Pada tingkat regulatif, kebijakan Kampung Banjar juga memberikan perhatian terhadap penguatan kelembagaan lokal. Bentuk pembinaan mencakup peningkatan wawasan dan keterampilan teknis, fasilitasi sarana-prasarana, serta peningkatan kualitas manajemen Pokdarwis dan/atau Karang Taruna melalui pelatihan manajerial, pengembangan jaringan dan pendampingan organisasi.

Orientasi tersebut kemudian diterjemahkan dalam program tahunan. Pada 2023 terdapat kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata dengan target satu kelompok masyarakat, di samping pengelolaan destinasi dengan target 150.000 kunjungan wisatawan. Artinya, pemerintah mengombinasikan pendekatan yang berorientasi pada performa destinasi dengan peningkatan kapasitas aktor lokal.

Ekonomi kreatif juga menjadi bagian dari konfigurasi kebijakan tersebut. RPJMD secara konsisten memasukkan fasilitasi pendanaan dan pembiayaan usaha ekonomi kreatif, pengembangan kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif, serta pelatihan dan pendampingan ekonomi kreatif. Pada RKPD 2025, pemberdayaan masyarakat, kompetensi SDM, pendanaan ekonomi kreatif, kemitraan, serta pelatihan ekonomi kreatif tetap menjadi subprioritas penguatan daya saing pariwisata dan pelestarian budaya Banjar.

Hal ini penting dalam konteks kampung wisata Banjarmasin karena daya tarik kampung tidak semata-mata berasal dari lingkungan fisik. Produk sasirangan, kuliner, kerajinan, aktivitas masyarakat, dan budaya lokal merupakan bagian dari produk wisata. Dengan demikian, ekonomi kreatif berfungsi sebagai penghubung antara pengembangan destinasi dengan penciptaan manfaat ekonomi lokal.

Konsistensi Prioritas dan Kesenjangan antara Perencanaan dan Realisasi

Analisis lintas dokumen menunjukkan tingkat konsistensi vertikal yang relatif kuat. Arah kebijakan RPJMD diterjemahkan dalam Renstra, RKPD, dan Renja melalui program destinasi, pemasaran, SDM, ekonomi kreatif, pemberdayaan, dan kemitraan. Pada RKPD 2025, misalnya, penguatan daya saing pariwisata dan pelestarian budaya Banjar diterjemahkan ke dalam 15 subprioritas, mulai dari daya tarik wisata berbasis sungai hingga destinasi berkelanjutan, kemitraan, pemasaran, pemberdayaan masyarakat, SDM, dan ekonomi kreatif.

Namun, konsistensi pada tingkat perencanaan tidak selalu identik dengan realisasi. LKj 2024 menunjukkan bahwa beberapa subkegiatan tidak terlaksana, termasuk fasilitasi sertifikasi kompetensi tenaga kerja bidang pariwisata serta monitoring dan evaluasi pengembangan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif. Dokumen tersebut menjelaskan bahwa kondisi ini berkaitan dengan pembatasan belanja APBD untuk menjaga keseimbangan kapasitas fiskal dan ketersediaan kas daerah.

Temuan tersebut menunjukkan pentingnya membedakan antara *policy intention*, *policy allocation*, dan *policy realization*. Suatu agenda dapat memperoleh posisi dalam dokumen strategis dan bahkan diterjemahkan menjadi kegiatan serta anggaran, tetapi pelaksanaannya tetap dipengaruhi oleh kapasitas fiskal dan dinamika pengelolaan anggaran daerah. Dengan demikian, prioritas kebijakan tidak cukup dianalisis hanya dari keberadaannya dalam dokumen perencanaan.

Di sisi lain, indikator kinerja menunjukkan kecenderungan orientasi pada hasil yang mudah diukur secara agregat, khususnya kunjungan wisatawan, kontribusi ekonomi, fasilitas, dan pemasaran. Pada 2024, misalnya, indikator bidang pariwisata mencakup cakupan kelengkapan infrastruktur, peningkatan wisatawan nusantara dan mancanegara, efektivitas media pemasaran, serta persentase SDM pariwisata bersertifikasi. Pada 2025, pengelolaan destinasi UPTD juga menggunakan jumlah kunjungan wisatawan

sebagai indikator, dengan target 170.000 dan realisasi 194.741 kunjungan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa aspek pemberdayaan dan keberlanjutan memang hadir dalam substansi kebijakan, tetapi pengukuran kinerja masih relatif kuat pada output dan outcome agregat pariwisata. Indikator yang secara khusus mengukur keberlanjutan pengelolaan kampung, kapasitas Pokdarwis, kualitas partisipasi masyarakat, atau manfaat ekonomi yang diterima masyarakat lokal belum tampak sekuat indikator kunjungan dan infrastruktur dalam dokumen yang dianalisis.

Keselarasan Prioritas Kebijakan dengan Kebutuhan Kampung Wisata

Analisis selanjutnya membandingkan prioritas pemerintah dengan kebutuhan empiris kampung wisata yang ditemukan dalam penelitian terdahulu. Hasilnya menunjukkan bahwa secara substantif sebagian besar kebutuhan kampung telah memiliki padanan dalam instrumen kebijakan pemerintah, tetapi tingkat keselarasan dan karakter kebutuhan berbeda antar-destinasi.

Tabel 3. Keselarasan Prioritas Kebijakan dengan Kebutuhan Kampung Wisata

Kampung/kawasan	Kebutuhan empiris utama	Respons/prioritas kebijakan terkait	Interpretasi
Kampung Sasirangan	Lingkungan, limbah, permukiman, budaya	Destinasi, infrastruktur, budaya, keberlanjutan	Selaras secara substantif
Kampung Hijau	CBT, lingkungan, wisata edukasi	Pemberdayaan, destinasi berkelanjutan, SDM	Keselarasan kuat
Sungai Jingah	Pengetahuan dan kemampuan komunikasi masyarakat	SDM, pemberdayaan, promosi	Selaras secara substantif
Kampung Ketupat	Ekonomi lokal, budaya, keberlanjutan pengelolaan	Ekraf, destinasi, budaya, kemitraan	Selaras secara substantif
Banua Anyar	Kuliner, SDM, pengelolaan, sarana-prasarana	Ekraf, SDM, infrastruktur, kemitraan	Selaras secara substantif
Kampung Biru	Aksesibilitas darat dan sungai	Infrastruktur, amenities, aksesibilitas/destinasi berbasis sungai	Selaras secara substantif

Kampung Sasirangan memiliki potensi berupa kain sasirangan, rumah tua adat Banjar, permukiman tepian sungai, aksesibilitas, dan sarana-prasarana. Namun, persoalan bangunan semi permanen dan pembuangan limbah langsung ke sungai masih menjadi kendala. Di satu sisi, kondisi tersebut selaras dengan prioritas pemerintah pada destinasi, infrastruktur, budaya, dan keberlanjutan. Bahkan Renstra secara spesifik menyebut optimalisasi Kampung Sasirangan melalui pemetaan potensi wisata. Di sisi lain, persoalan limbah dan kualitas permukiman berada di luar kewenangan sektor pariwisata semata (Lovely & Idajati, 2022). Kasus ini menunjukkan bahwa pengembangan kampung wisata membutuhkan koordinasi lintas perangkat daerah, sehingga kesenjangan yang muncul lebih tepat dipahami sebagai persoalan tata kelola lintas sektor.

Keselaran yang relatif kuat terlihat pada Kampung Hijau yang memiliki karakter sebagai destinasi berbasis *Community-Based Tourism* dengan potensi wisata edukasi terkait adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Orientasi tersebut memiliki padanan langsung dengan kebijakan pemerintah mengenai CBT, pemberdayaan masyarakat, serta penerapan destinasi pariwisata berkelanjutan. Bahkan pada 2024 terdapat kegiatan khusus penerapan destinasi pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan strategis (Riadi et al., 2020).

Sementara itu Kampung Wisata Sungai Jingah memiliki potensi berdasarkan komponen *attraction*, *accessibility*, *amenity*, dan *ancillary*, tetapi masih membutuhkan peningkatan pengetahuan dan kemampuan komunikasi masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan destinasi tidak selalu berupa tambahan fasilitas fisik. Kebijakan peningkatan kompetensi SDM, pemberdayaan masyarakat, pelatihan, dan pemasaran memiliki relevansi yang lebih besar terhadap persoalan Sungai Jingah (Risanta & Diany, 2025).

Pada Kampung Ketupat, industri rumah tangga ketupat, lontong, dan kerajinan nipah teridentifikasi sebagai potensi ekonomi sekaligus identitas budaya kawasan. Kebutuhan tersebut secara substantif memiliki kesesuaian dengan orientasi pemerintah pada ekonomi kreatif, destinasi, pelestarian budaya, dan kemitraan (Ling & Muchamad, 2022). Kampung Ketupat juga secara konsisten tercantum sebagai salah satu wisata kampung tematik dalam dokumen perencanaan. Namun, pengelolaan Kampung Ketupat sempat vakum sebelum kembali diaktifkan (Banjarmasin, 2025). Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kesesuaian antara potensi destinasi dan pilihan kebijakan belum otomatis menjamin keberlanjutan pengelolaan.

Pada kampung wisata kuliner Banua Anyar, kebutuhan pengembangan menunjukkan karakter yang berbeda karena bertumpu pada potensi kuliner lokal. Keberlanjutan pengembangannya memerlukan dukungan pada aspek perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, peningkatan sumber daya manusia, serta penyediaan sarana dan prasarana oleh pemerintah maupun swasta. Temuan tersebut menunjukkan adanya keselaran substantif dengan prioritas kebijakan Pemerintah Kota Banjarmasin pada pengembangan destinasi dan infrastruktur, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, ekonomi kreatif, serta kemitraan. Namun, karakter Banua Anyar yang berbasis kuliner lokal menunjukkan bahwa intervensi kebijakan tidak cukup hanya diarahkan pada penguatan fisik destinasi, tetapi juga perlu mendukung kapasitas pelaku usaha, keberlanjutan produk kuliner lokal, dan tata kelola kawasan. Kasus Banua Anyar dengan demikian semakin memperkuat pentingnya pendekatan kebijakan yang disesuaikan dengan karakter dan kebutuhan spesifik masing-masing destinasi (Jannah et al., 2022).

Pada Kampung Biru, kebutuhan pengembangan terutama berkaitan dengan aspek aksesibilitas. Dibandingkan Kampung Hijau dan Kampung Sasirangan, Kampung Biru memperoleh nilai kebutuhan pengembangan aksesibilitas tertinggi. Kondisi tersebut dikaitkan dengan akses darat menuju kawasan yang harus melalui gang sempit, sementara akses melalui sungai didukung dermaga yang belum sebaik Kampung Hijau. Di sisi lain, Kampung Biru telah memiliki dukungan promosi melalui media sosial dan kondisi sarana-prasarana yang relatif lebih baik dibandingkan Kampung Sasirangan. Temuan ini menunjukkan adanya keselaran substantif dengan prioritas Pemerintah Kota Banjarmasin pada pengembangan infrastruktur, amenitas, dan destinasi wisata berbasis sungai. Dalam konteks Kampung Biru, intervensi kebijakan dapat lebih diarahkan pada peningkatan konektivitas dan kemudahan akses menuju destinasi dibandingkan penerapan intervensi yang seragam dengan kampung wisata lainnya (Maulana & Maulina, 2024).

Dari Policy Alignment Menuju Kebijakan Berbasis Karakter Destinasi

Secara keseluruhan, hasil penelitian tidak menunjukkan kekurangan instrumen kebijakan secara mendasar. Pemerintah Kota Banjarmasin telah memiliki instrumen terkait destinasi, infrastruktur, pemasaran, SDM, pemberdayaan, kemitraan, ekonomi kreatif, budaya, dan keberlanjutan. Permasalahan yang lebih menonjol justru terdapat pada heterogenitas kebutuhan antar-kampung wisata.

Sasirangan menghadapi persoalan lingkungan permukiman; Kampung Hijau memiliki karakter lingkungan dan wisata edukasi; Sungai Jingah membutuhkan penguatan kapasitas masyarakat; Kampung Ketupat membutuhkan penguatan ekonomi lokal dan keberlanjutan pengelolaan; Banua Anyar memerlukan penguatan tata kelola, sumber daya manusia, dan keberlanjutan usaha kuliner; sedangkan Kampung Biru menunjukkan kebutuhan yang lebih menonjol pada aspek aksesibilitas. Keragaman tersebut menunjukkan bahwa keberadaan instrumen kebijakan yang relatif lengkap tidak berarti setiap kampung membutuhkan kombinasi intervensi yang sama. Keselarasan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh tersedianya instrumen yang relevan, tetapi juga oleh ketepatan intervensi dalam merespons karakter, permasalahan, dan kebutuhan spesifik masing-masing destinasi.

Temuan ini mengarah pada kebutuhan pendekatan kebijakan berbasis karakter tempat (*place-based policy*). Dalam pendekatan tersebut, pemerintah tidak hanya menentukan jenis program pada tingkat kota, tetapi memetakan karakter, kapasitas, masalah, dan tahap perkembangan masing-masing kampung untuk menentukan kombinasi instrumen kebijakan yang berbeda. Arah seperti ini sebenarnya telah memperoleh ruang dalam dokumen pemerintah. Renja 2023, misalnya, membedakan tahapan pengembangan destinasi menjadi rintisan, berkembang, pemantapan, dan revitalisasi.

Dengan demikian, policy gap utama bukan terletak pada ketiadaan program pengembangan kampung wisata, tetapi pada kebutuhan untuk meningkatkan diferensiasi intervensi dan konsistensi implementasi sesuai karakter masing-masing destinasi. Temuan ini sekaligus menjelaskan bahwa pengembangan kampung wisata di Banjarmasin lebih tepat dipahami sebagai kebijakan yang bersifat lintas-program (*cross-programmatic*). Kampung wisata menjadi locus berbagai intervensi—destinasi, infrastruktur, pemasaran, pemberdayaan, ekonomi kreatif, budaya, dan kolaborasi—bukan sebuah program tunggal yang berdiri sendiri.

Dari perspektif administrasi publik, kondisi tersebut menempatkan koordinasi, kapasitas implementasi, dan kemampuan pemerintah melakukan prioritas berbasis kebutuhan lokal sebagai faktor penting. Tantangan pengembangan kampung wisata ke depan bukan semata memperbanyak program atau destinasi baru, tetapi memastikan bahwa sumber daya yang terbatas diarahkan pada masalah yang paling relevan bagi masing-masing kampung serta diikuti indikator kinerja yang mampu menangkap keberlanjutan pengelolaan dan manfaat bagi masyarakat lokal.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pengembangan kampung wisata di Kota Banjarmasin periode 2021–2025 memiliki arah yang relatif konsisten dalam mendukung pariwisata berbasis sungai dan pelestarian budaya Banjar. Pada tingkat operasional, pengembangan destinasi dan infrastruktur menjadi prioritas paling dominan, didukung oleh konsistensi program dan alokasi anggaran, diikuti pemasaran, pengembangan SDM, pemberdayaan masyarakat, ekonomi kreatif, serta aspek kelembagaan dan

keberlanjutan.

Secara substantif terdapat keselarasan (policy alignment) antara prioritas pemerintah dan kebutuhan kampung wisata, meskipun karakter kebutuhan berbeda antar-destinasi, mulai dari persoalan lingkungan dan permukiman, pemberdayaan dan keberlanjutan, kapasitas masyarakat, ekonomi lokal dan tata kelola, hingga aksesibilitas. Temuan ini menunjukkan bahwa kesenjangan kebijakan (policy gap) tidak terutama terletak pada ketiadaan program, melainkan pada diferensiasi intervensi, konsistensi implementasi, dan kemampuan kebijakan merespons kebutuhan spesifik setiap kampung. Adanya kegiatan yang tidak terealisasi juga menunjukkan masih terdapat jarak antara perencanaan dan pelaksanaan kebijakan. Pengembangan kampung wisata di Banjarmasin dengan demikian bersifat lintas-program (*cross-programmatic*) dan membutuhkan pendekatan berbasis karakter tempat (*place-based policy*). Pemerintah perlu memetakan kebutuhan dan tahap perkembangan setiap kampung sebagai dasar penentuan intervensi dan alokasi sumber daya, disertai penguatan koordinasi lintas sektor, kelembagaan lokal, pemberdayaan masyarakat, dan keberlanjutan pengelolaan. Penelitian ini terbatas pada data sekunder dan dokumen kebijakan sehingga belum menangkap perspektif langsung pemerintah, pengelola, dan masyarakat. Penelitian selanjutnya dapat mengombinasikan analisis dokumen dengan wawancara pemangku kepentingan untuk menguji keselarasan antara prioritas kebijakan formal dan kebutuhan aktual destinasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Banjarmasin, P. K. (2025). *Sempat Vakum, Kawasan Wisata Kampung Ketupat Hadir dengan Nuansa Baru dan Tanpa Dipungut Biaya*. <https://www.banjarmasinikota.go.id/2025/01/sempat-vakum-kawasan-wisata-kampung.html>
- Evi, T., Gai, A. M., Fauza, M., & Hatchi, I. (2025). *Buku Referensi Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Teknik Dan Strategi Dalam Mengolah Data*. Media Penerbit Indonesia.
- Jannah, R., Abbas, E. W., Jumriani, Handy, M. R. N., & Putra, M. A. H. (2022). Banua Anyar Culinary Tourism Area as a Tourism Attraction in Banjarmasin. *The Innovation of Social Studies Journal*, 3(2), 157–162. <https://doi.org/https://doi.org/10.20527/iis>
- Ling, M., & Muchamad, B. N. (2022). KAWASAN WISATA KAMPUNG KETUPAT DI KOTA BANJARMASIN. *Jurnal Tugas Akhir Mahasiswa Lanting*, 11(2), 138–152. <https://doi.org/https://doi.org/10.20527/jtamlanting.v11i2.1405>
- Lovely, V., & Idajati, H. (2022). Potensi dan Kendala Pengembangan Kampung Lingkungan Permukiman di Kampung. *JURNAL PENATAAN RUANG*, 17(1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.12962%2Fj2716179X.v17i1.9301>
- Maulana, R., & Maulina, D. (2024). Analisis Prioritas Pengembangan Kampung Wisata pada Pinggiran Sungai di Kota Banjarmasin Rizky. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 7(1), 106–115. <https://doi.org/https://doi.org/10.20527/jiep.v7i1.82>
- Nurislamingsih, R., & Heriyanto. (2024). *Riset Kualitatif untuk Pemula Teknis Analisis Data*. Intishar Publishing.
- Riadi, S., Normelani, E., Bachri, A. A., Hidayah, N., Sari, Y. P., & Mangkurat, U. L. (2020). Rancangan atraksi wisata edukasi di kampung hijau kota banjarmasin. *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(1), 37–44. <https://doi.org/10.1886/jpips.v7i1.10364>
- Risanta, M., & Diany, A. A. (2025). Potensi pengembangan kampung sungai jingah banjarmasin kalimantan selatan. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 5(2), 714–721. <https://doi.org/10.53866/jimi.v5i2.682>